

Kewajiban notaris terhadap pendaftaran karyawan notaris sebagai peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang berdasarkan memorandum of understanding nomor 03/MOU/PP-INI/II/2017 = Notary liability towards employee enrollment as badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan participant national social security in Kabupaten Tangerang based on memorandum of understanding number 03/MOU/PP-INI/II/2017

Fanny Amalul Arifin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476669&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Sebagai pemberi kerja notaris berkewajiban mendaftarkan dirinya dan karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendaftaran jaminan sosial oleh Notaris sangat diperlukan dalam melindungi karyawan dari kemungkinan resiko dalam melakukan pekerjaannya. Permasalahan dalam tesis ini yakni 1 Bagaimana kewajiban Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan? 2 Bagaimana pelaksanaan pendaftaran bagi karyawan Notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, serta mengkaji sumber data sekunder yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dan untuk mendukung penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian tipe penelitian yang akan digunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah metode penelitian deskriptif analisis. Simpulan dalam penelitian ini yakni: 1.Kewajiban notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat kurang. Belum semua notaris mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pengurus Pusat INI juga mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PP-INI. 2.Pelaksanaan pendaftaran karyawan notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada notaris dikarenakan penolakan dari anggota INI Kabupaten Tangerang.

<hr>

ABSTRACT

As public notary, They obligated to register themselves and the employee in the social security program of employment. Social Security enrolled by Notary is highly recommended in order to protect employees in risk assignment. The problems in this thesis are 1 How does Notary obligation to register their employees as Participant of BPJS 2 How does the implementation of registration for Notary employees in Kabupaten Tangerang as participant of BPJS Employment This research conducted using juridical normative literature and reviewing secondary data resources which refer to the written rules or positive law and other legal materials related to the problem. And to support the research, interviews with related parties are conducted. Therefore, in order to support literature research, the writer has interviewed related parties. Based on point of view, this research will be using descriptive research method. This research

conclude that 1. notaries awareness to enroll their employee as BPJS participant is quite inconsiderable. Not all notaries register their employee as participants BPJS Employment as regulated law. The executive of INI also take supporting action in social security implementation through MOU between BPJS Employment with PP INI. 2. Implementation of notary employees enrollment in Tangerang are not optimum due to lack of social security program knowledge which caused by INI's member rejection. The results suggest it needs involvement of Labor Ministry Supervisory Council to register Notaries and the employees as BPJS employment participants.